

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 4 AYAT (2) UNDANG-UNDANG
KEHUTANAN DALAM SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KAWASAN
HUTAN YANG DIKUASAI MASYARAKAT**

Oleh

Komang Kembar Suardani Yasmi, NIM 2214101169

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Pasal 4 ayat (2) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam sengketa hak atas tanah di kawasan hutan yang dikuasai masyarakat. Permasalahan penelitian berfokus pada ketidakjelasan batas kewenangan negara yang berpotensi menimbulkan benturan dengan hak masyarakat atas tanah yang dikuasai secara turun-temurun. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 4 ayat (2) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan masih mengandung kekaburan norma sehingga menimbulkan disharmonisasi antara hukum kehutanan dan hukum agraria serta menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap hak atas tanah masyarakat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2812 K/Pdt/2019 menegaskan bahwa penguasaan tanah secara nyata dan beritikad baik tetap harus memperoleh perlindungan hukum meskipun berada di kawasan hutan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan penyempurnaan norma melalui penambahan ketentuan yang menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan negara harus dilakukan secara proporsional dengan batas yang jelas serta tetap mengakui dan melindungi penguasaan tanah masyarakat yang telah ada sebelum penetapan kawasan hutan demi terciptanya kepastian hukum dan harmonisasi antara hukum kehutanan dengan hukum agraria.

Kata Kunci : Penguasaan Tanah, Hak Atas Tanah, Kawasan Hutan.

***LEGAL REVIEW OF ARTICLE 4 PARAGRAPH (2) OF THE FORESTRY
LAW IN LAND RIGHTS DISPUTES IN COMMUNITY-CONTROLLED
FOREST AREAS***

By

Komang Kembar Suardani Yasmi, NIM 2214101169

Legal Studies Program

ABSTRACT

This study aims to legally analyze Article 4 paragraph (2) of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry in land rights disputes in forest areas controlled by communities. The research problem focuses on the unclear boundaries of state authority that have the potential to cause conflicts with community rights to land controlled by generations. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach, and is analyzed qualitatively through grammatical, systematic, and teleological interpretations. The results of the study indicate that Article 4 paragraph (2) of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry still contains unclear norms, thus causing disharmony between forestry law and agrarian law and causing legal uncertainty regarding community land rights. Supreme Court Decision Number 2812 K/Pdt/2019 emphasizes that real and good faith land ownership must still receive legal protection even though it is in a forest area. Based on these findings, this study proposes improvements to norms by adding provisions that emphasize that the implementation of state authority must be carried out proportionally with clear boundaries and continue to recognize and protect community land ownership that existed before the designation of forest areas in order to create legal certainty and harmonization between forestry law and agrarian law.

Keywords: Land Tenure, Land Rights, Forest Area.